

Puluhan Proposal Bantuan Mandek, Petani Tuban Demo Tuntut Kadis DKP2P Dicopot



kabartuban.com – Kesabaran petani, peternak, dan nelayan di Kabupaten Tuban tampaknya mulai menipis. Puluhan proposal bantuan yang disebut tak kunjung mendapat rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP2P) memicu kemarahan mereka. Puncaknya, Aliansi Petani, Peternak, dan Nelayan Merah Putih menggelar demonstrasi di Kantor Bupati Tuban, Kamis (22/10/2026), sekaligus mendesak pencopotan Kepala DKP2P, Eko Julianto.

Massa menilai lambannya proses rekomendasi telah menghambat kelompok masyarakat dalam mengakses program bantuan pemerintah. Mereka pun meminta Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, turun tangan mengevaluasi kinerja dinas sekaligus menelusuri dugaan adanya pihak yang mempersulit pengajuan bantuan. Aksi tersebut bukan sekadar menyampaikan keluhan. Para demonstran datang membawa tuntutan agar persoalan

yang mereka hadapi segera mendapat kepastian. Sekitar pukul 08.00 WIB, massa terlebih dahulu berkumpul di GOR Rangka Jaya Anoraga sebelum bergerak bersama menuju Kantor Bupati Tuban.

Di depan gedung Pemkab Tuban di Jalan RA Kartini, para peserta aksi bergantian menyuarakan kekecewaan. Tuntutan evaluasi terhadap DKP2P terus digaungkan. Sebagai simbol protes, massa bahkan melempar telur dengan berat total sekitar 15 kilogram.

Koordinator aksi, Arif Kasto, mengatakan kemarahan kelompoknya berangkat dari berbagai persoalan yang dinilai menghambat masyarakat dalam memperoleh manfaat program pemerintah. Selain proses birokrasi yang dianggap berbelit, mereka juga mempersoalkan dugaan bantuan yang tidak tepat sasaran dan lambannya pelayanan dinas.

“Kami menilai ada banyak persoalan di lapangan, mulai dari program yang tidak tepat sasaran, birokrasi yang berbelit, hingga dugaan adanya pihak yang memperlambat masyarakat dalam mengakses bantuan,” kata Kasto se usai demonstrasi.

Arif mengungkapkan, salah satu persoalan yang paling disorot adalah nasib 38 hingga 39 proposal bantuan dari kelompok tani dan perikanan. Menurut dia, proposal yang berkaitan dengan program kementerian maupun aspirasi DPR RI tersebut telah tertahan di dinas selama sekitar dua bulan.

Kondisi itu membuat pihaknya mempertanyakan proses pelayanan yang berjalan. Arif mengklaim seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi, tetapi rekomendasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan....

[Baca Selengkapnya....](#)



Usia ke-62, Golkar Tuban Perkuat Pengabdian masyarakat dan Pasang Target Politik Baru

kabartuban.com – Memasuki usia ke-62 tahun, Partai Golkar menjadikan pengabdian kepada masyarakat sebagai pijakan untuk memperkuat kiprah politik sekaligus mengawal pembangunan daerah. Momentum peringatan hari ulang tahun (HUT) yang jatuh pada 20 Oktober 2026 ini juga menjadi ajang bagi DPD Partai Golkar Kabupaten Tuban untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan menatap target politik ke depan.

Sekretaris DPD Partai Golkar Tuban, Suratmin, menegaskan bahwa pertambahan usia partai harus diiringi dengan peningkatan kontribusi nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan partai tidak hanya diukur dari capaian politik, tetapi juga dari kemampuan menjawab persoalan yang dihadapi warga.

Sejalan dengan tema nasional “Golkar Bersama Rakyat, Karya Nyata, Rakyat Sejahtera”, Golkar Tuban berkomitmen untuk terus memperhatikan berbagai

persoalan masyarakat, termasuk kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla).

“Sesuai arahan Ketua Umum, Ketua DPD Golkar Provinsi, dan Ketua DPD Golkar Tuban, kami fokus pada permasalahan masyarakat saat ini, seperti kekeringan, karhutla, dan persoalan lainnya,” tegas Suratmin.

Menurutnya, semangat kebersamaan dengan rakyat harus diwujudkan melalui langkah konkret yang manfaatnya dapat dirasakan langsung. Karena itu, momentum HUT ke-62 diharapkan menjadi penguat bagi seluruh kader untuk terus hadir di tengah masyarakat dan berkontribusi dalam penyelesaian berbagai persoalan daerah.

Di sisi lain, Golkar Tuban juga memiliki modal politik yang kuat. Pada periode 2024-2029, partai berlambang....

[Baca Selengkapnya....](#)

Kemiskinan Tuban Turun 1,21 Persen, Kini Tak Lagi Masuk Lima Daerah Termiskin di Jatim

kabartuban.com - Angka kemiskinan di Kabupaten Tuban menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban, persentase penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat sebesar 12,92 persen, turun dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 14,13 persen.

Penurunan sebesar 1,21 poin persentase tersebut menjadi yang terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Sampang. Capaian ini turut mengeluarkan Tuban dari kelompok lima daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur, meski persentase penduduk miskinnya masih berada di posisi keenam tertinggi di provinsi tersebut.

Jumlah penduduk miskin di Tuban pada Maret 2026 tercatat sebanyak 154,83 ribu jiwa. Angka tersebut berkurang 14,03 ribu jiwa dibandingkan periode yang sama pada 2025, ketika jumlah penduduk miskin mencapai 168,86 ribu jiwa. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Kabupaten Tuban, Arif Handoyo,

Kemiskinan Tuban Turun 1,21 Persen, Kini Tak Lagi Masuk Lima Daerah Termiskin di Jatim

Angka kemiskinan di Kabupaten Tuban menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Tuban, persentase penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat sebesar **12,92 persen**, turun dibandingkan Maret 2025 yang mencapai **14,13 persen**.



menyebut penurunan tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan pembangunan daerah. Namun, menurutnya, capaian itu tetap perlu diikuti dengan program berkelanjutan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban terus mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan melalui sejumlah strategi. Upaya tersebut meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, serta penanganan wilayah yang masih menjadi kantong kemiskinan.

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky atau Mas Lindra, menekankan bahwa keberhasilan penurunan kemiskinan tidak cukup hanya dilihat dari angka statistik. Masyarakat juga perlu mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar, kesempatan kerja, serta peluang

untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Tuban turut menunjukkan perkembangan positif. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 6,47 persen, meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar 4,53 persen. Pertumbuhan tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja, menggerakkan aktivitas usaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan upaya pemerataan kesejahteraan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Tuban, Abdul Rakhmat, menyampaikan....

[Baca Selengkapnya....](#)



DPRD Bahas Peluang Kades Dua Periode Maju Lagi

kabartuban.com - Persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilka-des) serentak di Kabupaten Tuban pada 2027 mulai memasuki tahap perumusan regulasi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemilihan Kepala Desa untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Salah satu isu yang mencuat dalam pembahasan tersebut adalah peluang kepala desa yang telah menjabat dua periode untuk kembali maju dalam kontestasi mendatang. Selain itu, mekanisme pemungutan suara bagi warga yang sakit, pemeriksaan laporan pertanggungjawaban

calon petahana, hingga pencalonan tunggal turut menjadi perhatian.

Pembahasan itu dilakukan Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Tuban dengan melibatkan Bagian Hukum Pemkab Tuban, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A PMD), perwakilan kepala desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di gedung DPRD Tuban, Senin (19/10/2026).

Ketua Pansus III DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, mengatakan pelibatan berbagai unsur tersebut bertujuan menyamakan persepsi sebelum Raperda ditetapkan. Dengan demikian, aturan yang

disusun diharapkan tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

“Kami mengundang perwakilan kepala desa dan BPD untuk mendengar pendapat dari mereka dalam menyusun Raperda,” ujar politikus PKB tersebut.

Fahmi mengungkapkan, pembahasan sempat diwarnai perbedaan pandangan mengenai masa perodesasi kepala desa. Perbedaan itu berkaitan dengan masa jabatan lima tahun dan delapan tahun serta penghitungan periode bagi kepala desa yang telah menjabat sebelumnya. Namun, menurut Fahmi, persoalan tersebut telah menemukan titik te-

mu dalam rapat. Ia menjelaskan bahwa kesempatan untuk kembali mencalonkan diri tidak semata-mata ditentukan oleh lamanya seseorang menjabat.

“Jadi hanya beda pandangan saja. Masa perodesasi itu perodenya tadi ada lima tahun dan delapan tahun. Tadi telah diambil kesimpulan dalam perdebatan itu, perodenya bukan dari lama menjabatnya. Jadi, meski sudah dua kali perodesasi dengan masa delapan tahun, masih bisa mencalonkan lagi di periode 2027 mendatang,” jelasnya.

Ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa juga diatur dalam Undang-Undang....

[Baca Selengkapnya....](#)



Polresta Tuban Sisir 31 SPBU, Wanti-wanti Aksi Borong dan Penimbunan

kabartuban.com – Kekhawatiran kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah menjadi perhatian Polresta Tuban. Untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, polisi memantau ketersediaan stok dan kelancaran distribusi BBM di 31 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Tuban, Minggu (18/10/2026).

Hasil pemantauan sementara menunjukkan stok BBM subsidi maupun nonsubsidi masih mencukupi. Distribusi dari PT Pertamina Fuel Terminal Tuban menuju SPBU juga dilaporkan berjalan normal, tanpa ditemukan antrean panjang, pembelian berlebihan atau panic buying, maupun pembelian dalam jumlah besar secara borongan.

Kasihumas Polresta Tuban, Iptu Mokhamad Iksan, mengatakan pemantauan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk

menjaga stabilitas pasokan sekaligus mencegah kepanikan masyarakat yang berpotensi mengganggu distribusi BBM.

“Distribusi dari Pertamina ke SPBU juga berjalan normal dan tidak ditemukan antrean panjang,” ujar Iksan.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak terpancing kekhawatiran mengenai kelangkaan BBM. Warga diminta membeli bahan bakar sesuai kebutuhan, bukan menimbun atau melakukan pembelian berlebihan yang justru berpotensi memicu antrean dan mengganggu ketersediaan di SPBU.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak panik dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan,” tambahnya.

Di sisi lain, Polresta Tuban tetap mewaspa-

dai potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk dugaan penimbunan oleh oknum yang ingin meraup keuntungan dengan menjualnya kembali. Pengawasan dilakukan untuk memastikan BBM bersubsidi tetap tersalurkan sesuai peruntukannya.

Koordinasi dengan manajemen PT Pertamina Fuel Terminal Tuban dan pengelola SPBU pun terus diperkuat. Pengelola SPBU diminta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kekosongan stok maupun antrean panjang agar dapat segera ditindaklanjuti. Jajaran Polsek juga diarahkan meningkatkan patroli dan pemantauan di wilayah masing-masing, khususnya di sekitar SPBU. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi pembelian BBM secara berlebihan serta aktivitas yang berpotensi mengganggu....

[Baca Selengkapnya....](#)



Wacana UU Anti-Bullying Kembali Mengua

kabartuban.com – Wacana pembentukan Undang-Undang (UU) Anti-Bullying kembali mencuat setelah meningkatnya Z (10), anak penyandang down syndrome di Surabaya yang diduga menjadi korban perundungan. Sebelumnya, Z sempat dibawa ke RSUD Eka Candrarini, namun nyawanya tidak tertolong.

Kasus tersebut bermula ketika dua anak tetangga korban, U dan I, terekam kamera CCTV masuk ke rumah Z pada 12 September 2026. Saat ibu korban pulang sekitar pukul 10.00 WIB, Z ditemukan dalam kondisi tergeletak di teras rumah. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Aris Adi Leksono menyambut positif munculnya dorongan untuk membentuk aturan khusus terkait anti-perundungan. Meski demikian, ia menilai gagasan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh.

Menurut Aris, Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah regulasi yang mengatur perlindungan anak dan kekerasan terhadap anak. Karena itu, perlu dipertimbangkan apakah aturan anti-bullying harus berdiri sebagai undang-undang tersendiri atau dapat diperkuat melalui regulasi yang sedang disusun.

“Perlu dicermati apakah memang perlu menjadi RUU tersendiri atau tidak, saya kira itu perlu dicermati di dalamnya,” kata Aris.

Ia menyebut penguatan aspek pencegahan perundungan juga dapat dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

RUU Sisdiknas yang tengah dibahas Komisi X DPR RI melalui proses penyerapan aspirasi masyarakat terdiri atas 16 bab dan 257 pasal. KPAI melihat regulasi tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem pencegahan kekerasan dan perundungan di satuan pendidikan.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan pihaknya tengah menyusun sejumlah usulan kebijakan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan.

Menurut Jasra, perlindungan anak dapat ditempatkan dalam Bab 11 RUU Sisdiknas yang membahas persoalan kekerasan. Namun, pengaturan tersebut dinilai tidak cukup hanya....

[Baca Selengkapnya....](#)

Tujuh Pegawai Semen Indonesia Ditangkap atas Dugaan Pencurian Forklift

kabartuban.com – dugaan pencurian satu unit forklift dari kawasan PT Semen Indonesia Group di Kabupaten Tuban diduga melibatkan tujuh pegawai perusahaan tersebut. Polisi mengungkap, forklift yang dilaporkan hilang itu masih berada di sekitar area perusahaan dan rencananya akan diangkut menggunakan kendaraan lain.

Kasus ini terjadi di kawasan perusahaan yang berada di Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Dugaan pencurian tersebut berlangsung pada Minggu (16/8/2026) sekitar pukul 10.45 WIB.

Terungkapnya kasus ini bermula dari laporan Ridwan, komandan peleton (danton) keamanan perusahaan. Informasi mengenai dugaan pencurian itu disampaikan melalui grup percakapan WhatsApp. Sehari setelah kejadian, Senin (17/8/2026) sekitar pukul 10.00 WIB, seorang saksi berinisial S bersama stafnya, T, mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk memastikan kondisi di lokasi. Saat melakukan pengecekan, keduanya mendapati satu unit forklift merek Liugong tipe CPCD30 berwarna kuning-hitam dengan nomor lambung 19 sudah tidak berada di tempatnya.



Kasatreskrim Polresta Tuban AKP Arya Widjaya melalui Kanit Reskrim Ipda Supriyanto menjelaskan, polisi kemudian berhasil mengungkap kasus tersebut dan menangkap tujuh orang yang diduga terlibat.

Para pelaku yang berhasil ditangkap di antaranya berinisial CE, ST, HS, SC, dan KG

serta lainnya,” kata Supriyanto, Jumat (23/10/2026).

Menurut Supriyanto, para terduga pelaku diketahui tidak lagi bekerja setelah kasus tersebut terungkap. Sementara itu,....

[Baca Selengkapnya....](#)




KEMENAG




Selamat memperingati

HARI SANTRI

Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas".


HARI SANTRI 2026
 SANTRI MENGUKATKAN NEGERI MENUJU INDONESIA EMAS

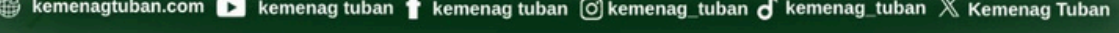
22 OKTOBER 2026



Hj. Umi Kulsum, S.Ag, M.Pd.I
Kakankemenag Kab. Tuban







kemenagtuban.com

[kemenag tuban](https://www.youtube.com/kemenagtuban)

[kemenag tuban](https://www.facebook.com/kemenagtuban)

[kemenag_tuban](https://www.instagram.com/kemenag_tuban)

[kemenag_tuban](https://www.tiktok.com/kemenag_tuban)

[Kemenag Tuban](https://twitter.com/KemenagTuban)